

PERENCANAAN KINERJA

**BAB**

**2**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2021.

* 1. **Perencanaan Kinerja**

Tahun 2021, merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Arah kebijakan sekaligus fokus/tema pembangunan tahunan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 adalah ***”Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur”***.Fokus pembangunan diarahkan untuk membangun produktivitas ekonomi dengan diiringi dengan menguatkan kebijakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif serta kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara menyeluruh, akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif, dalam rangka menuju **Karanganyar Maju dan Berdaya Saing**.

* + 1. **Rencana Strategis Lima Tahun (RPJMD)**

Visi, Misi dan tujuan jangka lima tahun tersebut dalam pencapaiannya dibagi dalam tahapan 1 tahunan. Berdasarkan pada rencana tahunan ini kinerja pemerintah akan dinilai kinerjanya setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam rangka “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rencana strategis lima tahun ini mencakup Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam jangka waktu lima tahun adalah :

*Visi :*

***“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”***

*Misi :*

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis;
4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan;
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

*Tujuan :*

Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

* 1. Mewujudkan kualitas pembangunan infeastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan

Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

* 1. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah;

Misi 3 : Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

* 1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

* 1. Terwujudnya pemerataan antar desa

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Olahraga

* 1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender
  2. Terwujudnya tata kelola pemerintahann yang baik
     1. **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

| **TUJUAN** | **SASARAN** |
| --- | --- |
|
|  |
| 1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan | * 1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas   2. Meningkatnya permukiman yang tertata   3. Meningkatnya infrasutruktur pelayanan publik   4. Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonominan daerah   5. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana   6. Menginkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 1. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah | * 1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan   2. Meningkatnya prduktivitas sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB   3. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan   4. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan   5. Meningkatnya nilai investasi daerah   6. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
| 1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi | * 1. Meningkatnya kualitas pendidikan   2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| 1. Terwujudnya pemerataan antar desa | * 1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa |
| 1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender | * 1. Meningkatnya kualitas keagaamaan dalam keberagaman   2. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan   3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga   4. Meningkatnya kesejahteraan sosial   5. Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak |
| 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | * 1. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas |

*Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023*

* + 1. **Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.

Di samping itu, penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 juga dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2020. Dengan kata lain, penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021. Dengan kata lain, penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sekaligus juga untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2021.

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tema, fokus dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tema, Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

| **Arah Kebijakan** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Tema:**  **Maju dan Berintegritas:**  **Fokus:**  Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas | **Tema:**  **Maju dan Tangguh:**  **Fokus:**  Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur | **Tema:**  **Maju dan Berdaya saing:**  **Fokus:**  Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung daya saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur | **Tema:**  **Maju dan Mandiri**  **Fokus:**  Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial | **Tema:**  **Maju dan Mantap**  **Fokus:**  Penguatan sinergi pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan |
| **Arah Kebijakan:**   1. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. 2. Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah 3. Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif | **Arah kebijakan:**   1. Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul 2. Pengembangan inovasi dan prestasi daerah 3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. 4. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak | **Arah Kebijakan:**   1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. 2. Fasilitasi desa mandiri dan berkembang 3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. | **Arah Kebijakan:**   1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. 2. Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif 3. Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif 4. Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif | **Arah Kebijakan:**   1. Fasilitasi desa mandiri dan berkembang 2. masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif. 3. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak 4. Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah 5. Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul 6. Pengembangan inovasi dan prestasi daerah 7. Pembangunan produktivitas ekonomi yang ber kualitas. |

*Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023*

Dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Kebijakan pembangunan Tahun 2021, diarahkan pada upaya untuk **Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur**. Fokus pembangunan diarahkan untuk menguatkan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara menyeluruh, akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif, dalam rangka menuju **Karanganyar Maju dan Berdaya Saing**.

Strategi prioritasnya yang diterapkan Kabupaten Karanganyar di Tahun 2021 adalah :

* 1. Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata;
  2. Penguatan UMKM;
  3. Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
  4. Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan.
  5. Peningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat;
  6. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing.

Prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dilakukan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

* 1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Dengan rangkaian kebijakan:

1. Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
2. Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart torurism and sustainable tourism*);
3. Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *smart economy*;
4. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa;
5. Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).
   1. Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif.

Dengan rangkaian kebijakan:

1. Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
2. Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
3. Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
4. Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
   1. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan rangkaian kebijakan:

1. Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
2. Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
3. Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
4. infrastruktur ekonomi wilayah;
5. infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya; fasilitas olahraga; panti sosial, fasilitas keagamaan).

Pada Tahun 2021-2023, sesuai dengan Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, karena di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 Program/Proyek dalam Perpres tersebut, yaitu :

1. Revitalisasi Pasar Kwadungan : berada di Desa Kwadungan Kec. Kerjo, merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen. Dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah utara Kabupaten Karanganyar.
2. Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan : berada di wilayah perkotaan, di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, menjadi penambahan sarana prasarana olah raga dan rekreasi di wilayah tengah.
3. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis): berada di wilayah timur Kabupaten Karanganyar, dimana wilayah tersebut berkembang pesat obyek-obyek wisata baru, yang dikelola oleh desa dan atau masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya akan memerlukan kegiatan pendukung diantaranya : penyediaan lokasi untuk pasar darurat; pengadaan sarana latihan olah raga; penyediaan sarpras perkemahan, penataan kawasan kawasan STA dll. Kegiatan – kegiatan pendukung ini juga menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021, sehingga terjadi kesinambungan antara kegiatan pusat dengan kegiatan daerah (kabupaten).

Adanya Pademi Virus Corona-19 pada Tahun 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini Tahun 2021, jelas akan berdampak pada Tahun 2021. Kondisi global, nasional dan regional terpengaruh oleh pandemi covid-19 ini, mengakibatkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan fokus dan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaan musrenbang, beberapa hal tersebut diatas juga menjadi perhatian dan masukan dari peserta. Memperhatikan hasil Musrenbangkab dan kondisi global, nasional dan regional terkait Pandemi Virus Corona-19 tahun ini,

maka perlu melakukan perubahan prioritas untuk rencana pembangunan tahun 2021, dengan menambahkan prioritas:

1. Penguatan Jaring Pengaman Sosial : penanganan masalah sosial (meningkatnya PMKS, kejahatan, pengangguran, kemiskinan) penyediaan bantuan sosial
2. Pemulihan ekonomi daerah : pendidikan dan pelatihan ketrampilan korban / masyarakat terdampak covid-19; (korban PHK, PKL, UKM dll); pemberian bantuan modal usaha dan perluasan jaringan pasar *(channeling)*

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pencapaian indikator makro daerah. Pada tahun 2021 sebagian besar penganggaran tetap difokuskan pada penanganan Covid 19. Pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan di Tahun 2021, peningkatan inflasi dan peningkatan pengangguran. Kondisi ini akan berdampak pada pencapaian indikator makro di Tahun 2021.

Dalam penjabaran Rencana 5 tahun tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana tahunan, sehingga disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; yang terdiri dari :
   1. Perencanaan;
   2. Keuangan;
   3. Kepegawaian;
   4. Pendidikan dan Pelatihan;
   5. Penelitian dan Pengembangan;
   6. Pengawasan.
3. Unsur Kewilayahan
4. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : unsur pendukung, unsur penunjang, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. ***Pendidikan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana terutama pendidikan non formal, mempertahankan indikator yang sudah tercapai, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

* 1. Program Pengelolaan Pendidikan
  2. Program Pengembangan Kurikulum
  3. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
  4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. ***Kesehatan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pemerataan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, sehingga memenuhi standar minimum pelayanan kesehatan. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

* + - 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
      2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
      3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
      4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. ***Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***

Diprioritaskan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah dengan sarpras yang baik, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan produksi pertanian dan pariwisata, meningkatkan sarana prasasarana perkantoran (gedung kantor dan fasilitas publik). Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengembangan Permukiman
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
11. ***Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman***

Diprioritaskan untuk mengurangi kawasan kumuh, mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemenuhan standar areal pemakaman. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. ***Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat***

Diprioritaskan untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan, korban bencana, pelanggaran perda, sehingga terwujud daerah yang tertib dan kondusif. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penanggulangan Bencana
4. ***Sosial***

Diprioritaskan untuk penyediaan jaminan jaring pengaman sosial, penanganan dan penanggulangan masalah PMKS dan PGOT, peningkatan ketrampilan. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar meliputi :

1. ***Tenaga Kerja***

Diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran dengan cara mengadakan pelatihan dan bantuan usaha, mengoptimalkan Balai Latihan Kerja, dan meningkatkan wirausahawan mandiri terutama dari kalangan pemuda, serta meningkatkan kerjasama tripartit yang harmonis. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. ***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***

Diprioritaskan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan penjaminan tumbuh kembang anak dalam rangka pengurangan stunting dan penurunan angka KDRT. Disamping juga untuk meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga (ekonomi dan sosial). Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. ***Pangan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pangan daerah, dalam rangka menjaga ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. ***Pertanahan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan kejelasan status tanah milik pemerintah daerah dan penyediaan tanah (lahan) untuk pelayanan publik. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Penatagunaan Tanah

1. ***Lingkungan*** ***Hidup***

Diprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (pengelolaan sampah, pemantauan polusi udara dan air), meningkatkan kualitas lingkungan dengan pelestarian dan peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. ***Administrasi*** ***Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan adminitrasi kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan lebih optimal. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. ***Pemberdayaan*** ***Masyarakat dan Desa***

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan adminitrasi pemerintah desa, meningkatkan kepemampuan dan peran desa dalam membangun wilayahnya. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. ***Pengendalian*** ***Penduduk dan Keluarga Berencana***

Diprioritaskan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, pemberdayaan dan meningkatkan keluarga sejahtera. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. ***Perhubungan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan rambu, pengatur, penunjuk dan perlindungan pengguna jalan kelaikan jalan kendaraan bermotor, sehingga korban kecelakaan berkurang. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1. ***Komunikasi dan Informatika***

Diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi (e-gov), secara terpadu, penyediaan informasi publik yang up todate, meningkatkan kerjasama dengan media massa. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. ***Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***

Diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan dunia usaha baik melalui koperasi maupun UMKM. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. ***Penanaman*** ***Modal***

Diprioritaskan untuk meningkatkan investasi di daerah, dengan penyediaan sarpras yang baik, penyediaan layanan yang cepat, jelas dan ramah, menambah daya tarik investasi (penataan peraturan, kemudahan administrasi), meningkatakan kerjasama dengan semua pihak dan sektor. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. ***Kepemudaan dan Olah Raga***

Diprioritaskan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga di daerah, dengan penyediaan sarana prasarana olah raga, dan peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat di desa dalam berwirausaha. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. ***Statistik***

Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi secara uptodate dan terbuka (*on line*). Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

1. ***Persandian***

Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan keamanannya. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

1. ***Kebudayaan***

Diprioritaskan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan benda cagar budaya, serta mengembangkan budaya daerah, terutama terkait dengan kesenian daerah dan nasional (tari, wayang, musik dll). Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. ***Perpustakaan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, lama kunjungan dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan baik kabupaten, kecamatan maupun desa, serta menumbuhkan minat baca masyarakat dan siswa. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Pembinaan Perpustakaan.

1. ***Kearsipan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen arsip yang disimpan, pelayanan penyediaan pemenuhan kebutuhan arsip secara cepat dan tepat. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
3. **Urusan Pilihan**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. ***Kelautan*** ***dan Perikanan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ikan, mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil perikanan. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. ***Pariwisata***

Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana obyek wisata, jumlah pengunjung dan lama kunjungan, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
5. ***Pertanian***

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pertanian (pangan dan ternak), mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil pertanian, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. ***Kehutanan***

Urusan kehutanan tidak ada program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

1. ***Energi dan Sumber Daya Mineral***

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat

1. ***Perdagangan***

Diprioritaskan untuk meningkatkan aktivitas pasar rakyat, penyediaan sarana prasarana pasar rakyat yang memenuhi standar, meningkatkan pontensi ekspor produk lokal, terutama di perdesaan. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. ***Peridustrian***

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah, penyediaan lapangan kerja baru, serta menciptakan industri yang ramah lingkungan. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

1. ***Transmigrasi***

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah peserta transmigrasi dan penyediaan bantuan bagi transmigran asal Karanganyar. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Progam Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. **Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Urusan unsur pendukunh urusan pemerintahan dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, provinsi dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian Dan Pembangunan
3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
4. **Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :

* + 1. Perencanaan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan, sikron dengan rencana pemerintah pusat dan provinsi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

* + - 1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
      2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    1. Keuangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen penganggaran, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

* + - 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
      2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
      3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
    1. Kepegawaian

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penataan, pembinaan dan pengembangan pegawai, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Kepegawaian Daerah.

* + 1. Penelitian dan Pengembangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil riset, kreasi dan inovasi daerah. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

* + 1. Pendidikan dan Pelatihan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai, dalam rangka mewujudkan pegawai yang profesional, berdayasaing dan kompeten. Dengan program prioritas Tahun 2021 yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1. **Urusan Unsur Pengawasan**

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Inspektorat. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

* 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. **Urusan Unsur Kewilayahan**

Urusan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan desa, dan pemerataan hasil pembangunan, dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des
6. **Urusan Unsur Pemerintahan Umum**

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Urusan Pemerintahan Umum oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang sinergis, aman dan kondusif. Dengan program prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah. Hal tersebut karena program ini merupakan program pelaksanaan administrasi guna pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran.

* 1. **Perjanjian Kinerja**

Melalui perjanjian kinerja, komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja menjadi terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

* + 1. **Perjanjian Kinerja Lima Tahun**

Untuk mengetahui pencapaian dan kesinambungan kinerja diperlukan rencana target kinerja lima tahunan yang nantinya akan dicapai/menjadi target capaian tahunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021. Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

***Tabel 2.3.***

**Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2018-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Makro Pembangunan** | **Satuan** | **Kondisi Awal (2018)** | **Target Capaian** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 64,31 | 62,31 | 62,41 | 57,33 | 57,78 | 58,24 |
|  | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,98 | 5,69 | 5,80 | 3,5-4,0 | 3,6-4,5 | 4,25-5 |
|  | Tingkat Inflasi | % | 2,48 | 3,10 | 3,10 | 3,0+1,0 | 3,0+1,0 | 3,0+1,0 |
|  | PDRB Per Kapita | Rp. 000 | 28.712 | 27.652 | 28.556 | 28.556 | 28.780. | 29.450 |
|  | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,28 | 3,05 | 2,86 | 5,90 | 5,85 | 5,80 |
|  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 75,54 | 75,64 | 75,74 | 75,96 | 76,19 | 76,30 |
|  | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,51 | 8,60 | 8,65 | 8,66 | 8,67 | 8,71 |
|  | Usia Harapan Hidup | Tahun | 77,36 | 77,32 | 77,57 | 77,60 | 77,63 | 77,84 |
|  | Angka Kemiskinan | % | 10,01 | 8,29-9,29 | 7,58-8,58 | 9,86 | 9,25 | 8,96 |
|  | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 96,70 | 97,00 | 97,02 | 97,25 | 97,30 | 97,35 |
|  | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | Na | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 |

*Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023*

Sedangkan rencana target capaian indikator kinerja terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

| **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator sasaran** | **Satuan** | **Kondisi Awal** | | **Capaian** | | **Target Capaian** | | | | | | **Kondisi Akhir** | | **Urusan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| **SEBELUM** | **SESUDAH** | **SEBELUM** | **SESUDAH** | **SEBELUM** | **SESUDAH** | **SEBELUM** | **SESUDAH** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan | 1. ***Rasio konektivitas*** | | | ***rasio*** | ***Na*** | **67** | **67** | ***67*** | ***30,33*** | ***Na*** | ***30,67*** | ***Na*** | ***31,33*** | ***Na*** | ***31,33*** | ***Na*** | ***Perhubungan*** |
|  | 1. Menurunnya angka kecelakaan lalu linta*s* | 1. Penurunan Angka Kecelakaan | rasio | 1,013 | 0,73 | 1,40 | 0,71 | 0,68 | Na | 0,66 | Na | 0,65 | Na | 0,65 | Na | Perhubungan |
| 1. ***Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah*** | | | ***%*** | ***Na*** | ***Na*** | ***Na*** | ***58,01*** | ***Na*** | ***57,96*** | ***Na*** | ***58,66*** | ***Na*** | ***59,35*** | ***Na*** | ***59,35*** | PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan |
|  | 1. Meningkatnya permukiman yang tertata | 1. Persentase Kawasan Kumuh | % | 1,09 | 0,95 | 1,6 | 0,52 | 0,41 | 0,84 | 0,24 | 0,62 | 0,15 | 0,39 | 0,15 | 0,39 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|  | 1. Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan | % | Na | Na | Na | 81,52 | Na | 81 | Na | 82 | Na | 83 | Na | 83 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|  | 1. Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik | 1. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan | % | Na | Na | Na | 75 | Na | 75 | Na | 76 | Na | 77 | Na | 77 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penunjang Pemerintahan |
|  | 1. Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah | 1. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan | % | Na | Na | Na | 75 | Na | 75 | Na | 76 | Na | 77 | Na | 77 | PUPR, Perhubungan, Perdagangan |
| 1. ***Indek Resiko Bencana*** | | | ***indeks*** | ***Na*** | ***130,40*** | ***130,40*** | ***130,40*** | ***Na*** | ***108,03*** | ***Na*** | ***108,03*** | ***Na*** | ***108,03*** | ***Na*** | ***108,03*** | ***KKUPM*** |
|  | 1. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana | 1. Persentase Berkurangnya korban bencana alam | % | Na | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | KKUPM |
| 1. ***Indek Kualitas Lingkungan Hidup*** | | | ***Indeks*** | ***62,17*** | ***64,31*** | ***64,63*** | **67,39** | ***62,49*** | **57,33** | ***62,53*** | ***57,78*** | ***62,66*** | ***58,24*** | ***62,66*** | ***58,24*** | ***Lingkungan Hidup*** |
|  | 1. Meningkat nya Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 80,25 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 75,20 | 75,20 | 75,30 | 75,30 | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 75,40 | Lingkungan Hidup |
|  |  | 1. Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 53,43 | 69,41 | 69,49 | 69,41 | 52,60 | 52,60 | 52,70 | 52,70 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | Lingkungan Hidup |
|  |  | 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 55,17 | 41,21 | 42,02 | 42,02 | 32,39 | 32,39 | 34,12 | 34,12 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | Lingkungan Hidup |
| **Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.  Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah | 1. ***Tingkat Pertumbuhan ekonomi*** | | | ***%*** | ***5,77*** | ***5,98*** | ***5,93*** | ***-1,87*** | ***5,90*** | ***3,5-4,0*** | ***6,01*** | ***3,6-4,5*** | ***6,12*** | ***4,25-5*** | ***6,12*** | ***4,25-5*** | ***Statistik*** |
| 1. ***Tingkat inflasi*** | | | ***%*** | ***3,15*** | ***2,48*** | ***2,30*** | ***1,38*** | ***3,05*** | ***3,0+1*** | ***3,00*** | ***3,0+1*** | ***2,95*** | ***3,0+1*** | ***2,95*** | ***3,0+1*** | ***Statistik*** |
| 1. ***PDRB Perkapita (Rp.000)*** | | | ***Rp.000*** | ***27.303*** | ***28.712*** | ***30.052*** | ***28.051*** | ***28.556*** | ***28.556*** | ***28.780*** | ***28.780*** | ***29.450*** | ***29.450*** | ***29.450*** | ***29.450*** | ***Statistik*** |
|  | * + 1. Meningkat nya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan | 1. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB | % | 13,73 | 13,45 | 12,09 | 13,26 | 15,01 | 15,01 | 15,51 | 15,51 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | Pertanian |
|  | 1. Skor Pola Pangan harapan | Nilai | 85 | 82,90 | 80,10 | 81,20 | 89 | 82 | 90 | 83,10 | 91 | 84,30 | 91 | 84,30 | Pangan |
|  |  | * + 1. Meningkat nya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | 1. Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | % | 3,20 | 3,19 | 3,26 | 3,05 | 5,1 | 5,1 | 5,25 | 5,25 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Pariwisata |
|  |  | * + 1. Meningkat nya produktivitas sektor perdagangan | 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | % | 6,68 | 5,82 | 6,86 | -4 | 11,56 | 1,65 | 11,67 | 1,67 | 11,77 | 1,70 | 11,77 | 1,70 | Perdagangan |
|  |  | * + 1. Meningkat nya produktivitas sektor indsutri pengolahan | 1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 5,88 | 6,03 | 6,30 | -1,17 | 47,14 | 2,60 | 47,25 | 3,00 | 47,36 | 3,20 | 47,36 | 3,20 | Perindustrian |
|  |  | * + 1. Meningkat nya nilai investasi daerah | 1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor | % | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 49,89 | 1,80 | 0,25 | 1,90 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | Penanaman Modal, Koperasi UMKM |
|  | 1. ***Tingkat Pengangguran Terbuka*** | | | ***%*** | ***3,17*** | ***2,28*** | ***3,15*** | ***5,96*** | ***2,68*** | ***5,90*** | ***2,46*** | ***5,85*** | ***2,31*** | ***5,80*** | ***2,31*** | ***5,80*** | ***Tenaga Kerja*** |
|  |  | * + 1. Meningkat nya tingkat partisi pasi angkatan kerja (TPAK) | 1. TPAK | % | 70,24 | 70,45 | 70,19 | 73,55 | 71,44 | 74,03 | 72,04 | 74,51 | 72,76 | 74,99 | 72,76 | 74,99 | Tenaga Kerja |
| **Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.  Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi | 1. ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*** | | | ***Indeks*** | ***75,22*** | ***75,54*** | ***75,89*** | ***75,86*** | ***75,84*** | ***75,96*** | ***75,94*** | ***76,19*** | ***76,04*** | ***76,30*** | ***76,04*** | ***76,30*** | ***Perencanaan*** |
|  | * + 1. Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Harapan lama Sekolah | Tahun | 13,65 | 13,66 | 13,67 | 13,68 | 13,74 | 13,81 | 13,77 | 13,87 | 13,82 | 13,98 | 13,82 | 13,98 | *Pendidikan* |
|  | 1. Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,5 | 8,51 | 8,52 | 8,56 | *8,7* | *8,66* | *8,75* | *8,67* | *8,80* | *8,71* | *8,80* | 8,71 | *Pendidikan* |
|  | * + 1. Meningkat nya derajat kesehat an masyarakat | 1. Usia Harapan Hidup | Tahun | 77,31 | 77,36 | 77,38 | 77,47 | 77,82 | 77,60 | 78,37 | 77,63 | 78,82 | 77,84 | 78,82 | 77,84 | *Kesehatan* |
| **Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Terwujudnya pemerataan antar desa | 1. ***Indeks Desa Membangun (IDM)*** | | | ***indek*** | ***0,6406*** | ***0,6416*** | ***0,6869*** | ***0,6919*** | ***0,6446*** | ***0,6845*** | ***0,6456*** | ***0,6852*** | ***0,6463*** | ***0,6858*** | ***0,6463*** | ***0,6858*** | ***Permasdes*** |
|  | * + 1. Meningkat nya kemajuan dan kemandirian desa | 1. Indeks Ketahanan Sosial | indek | 0,6440 | 0,6450 | 0,7899 | 0,8019 | 0,6480 | 0,7899 | 0,6490 | 0,7909 | 0,6500 | 0,7919 | 0,6500 | 0,7919 | *Permasdes* |
|  |  | 1. Indeks Ketahanan Ekonomi | Indek | 0,5940 | 0,5950 | 0,6319 | 0,6423 | 0,5980 | 0,6319 | 0,5990 | 0,6329 | 0,5990 | 0,6339 | 0,5990 | 0,6339 | *Permasdes* |
|  |  | 1. Indeks Ketahanan Lingkungan | indek | 0,6840 | 0,6850 | 0,6389 | 0,6317 | 0,6880 | 0,6317 | 0,6890 | 0,6317 | 0,6900 | 0,6317 | 0,6900 | 0,6317 | *Permasdes* |
| **Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender. | 1. ***Nilai Kabupaten Peduli HAM*** | | | ***Nilai*** | ***79,25*** | ***79,41*** | ***79,41*** | ***98,21*** | ***79,41*** | ***80,50*** | ***79,41*** | ***80,50*** | ***79,51*** | ***80,50*** | ***79,51*** | ***80,50*** | ***Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)*** |
|  | * + 1. Meningkat nya kualitas keagamaan dalam keberagaman. | 1. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan | Kasus | 230 | 175 | 140 | 198 | 130 | 130 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | KKUPM |
|  | 1. Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda | % | 85 | 85 | 86 | 82,3 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | KKUPM |
|  | 1. Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unsur Pemerintahan Umum |
|  | 1. ***Indeks Pembangunan Kebudayaan*** | | | ***Indeks*** | ***76*** | ***76*** | ***77*** | ***89,39*** | ***79*** | ***79*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** | ***Kebudayaan*** |
|  |  | * + 1. Meningkat nya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan | 1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 76 | 87,63 | 87,70 | 89,80 | 88,50 | 88,50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Kebudayaan |
|  |  | 1. Persentase kelompok seni budaya yang aktif | % | 12,85 | 13 | 13,15 | 88,97 | 13,45 | 13,45 | 13,60 | 13,60 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | Kebudayaan |
|  | 1. ***Prestasi Pemuda dan Olah Raga*** | | | ***Buah*** | ***20*** | ***20*** | ***40*** | ***15*** | ***60*** | ***4*** | ***80*** | ***10*** | ***100*** | ***15*** | ***100*** | ***15*** | ***Pemuda Olah Raga*** |
|  |  | * + 1. Meningkat nya prestasi pemuda dan olah raga | 1. Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional | Buah | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 2 | 40 | 5 | 50 | 8 | 50 | 8 | Pemuda dan Olahraga |
|  | 1. Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Buah | 10 | 10 | 20 | 15 | 30 | 2 | 40 | 5 | 50 | 7 | 50 | 7 | Pemuda dan Olahraga |
|  | 1. ***Angka kemiskinan*** | | | ***%*** | ***12,28*** | ***10,01*** | ***9,55*** | ***10,28*** | ***6,87-7,78*** | ***9,86*** | ***6,15-7,15*** | ***9,25*** | ***5,44-6,44*** | ***8,96*** | ***5,44-6,44*** | ***8,96*** | ***Statistik*** |
|  |  | * + 1. Meningkat nya kesejahteraan sosial | 1. Pengeluaran Perkapita | (Rp. juta/th) | 10,93 | 11,32 | 11,98 | 12,76 | 13,35 | 13,35 | 14,12 | 14,12 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | Statistik |
|  |  | 1. Persentase Penanganan PMKS | % | 1,02 | 1,15 | 1,50 | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Sosial |
|  | 1. ***IPG* *(Indeks Pembangungan Gender)*** | | | **indeks** | **96,50** | **96,70** | **97,00** | **96,48** | **97,25** | **97,25** | **97,30** | **97,30** | **97,35** | **97,35** | **97,35** | **97,35** | ***PP dan PA*** |
|  |  | * + 1. Meningkat nya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak | 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 74,27 | 74,31 | 74,52 | 74,76 | 74,71 | 74,71 | 74,81 | 74,81 | 74,95 | 74,95 | 74,95 | 74,95 | *PP dan PA* |
|  |  | 1. Kabupaten Layak Anak | Nilai | 370 | 732,11 | 742 | Na | 762 | 762 | 770 | 770 | 780 | 780 | 780 | 780 | *PP dan PA* |
| 5.2. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik | 1. ***Indeks Reformasi Birokrasi*** | | |  | ***Na*** | ***Na*** | **57,35** | **58,94** | **70** | **70** | **75** | **75** | **80** | **80** | **80** | **80** | ***Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)*** |
|  | 1. Meningkat nya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas | 1. Indeks SPBE | Indeks | 0 | 2,04 | 2,99 | 3,02 | 2,69 | 3,25 | 2,91 | 3,37 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | Kominfo |
| 1. Nilai SAKIP | Nilai | 57,52 | 62,38 | 65,02 | 67 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
| 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Keuangan |
| 1. Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN | Indeks | 74,67 | 76,67 | 78,67 | 57,16 | 82,67 | 60,00 | 84,67 | 62,00 | 86,67 | 65,00 | 86,67 | 65,00 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| 1. IKM Kabupaten | Indeks | Na | Na | 81,08 | 81,561 | 80,43 | 80,43 | 81,26 | 81,26 | 81,67 | 81,67 | 81,67 | 81,67 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
| 1. Maturitas SPIP | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pengawasan |
|  | 1. Indeks Arsip | Indeks | 49 | 67 | 75 | 80 | 81 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | Kearsipan |

*Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023*

* + 1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Dengan memperhatikan target capaian indikator dalam RPJMD tersebut dan mengacu pada :

* + 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4);
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10).
    3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2021.
    4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target Kinerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 yang telah disepakati secara lengkap tercantum pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**

Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

dan Perangkat Daerah Tahun 2021

| **Indikator Kinerja Utama**  **Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah** | **Satuan** | **Target RKPD 2021** | **Target Perubahan RKPD 2021** | **Urusan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah** | **%** | **57,96** | **57,96** | **PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan** |
| 1. Persentase Kawasan Kumuh | % | 0,84 | 0,84 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1. Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan | % | 81 | 81 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan | % | 75 | 75 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penunjang Pemerintahan |
| 1. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan | % | 75 | 75 | PUPR, Perhubungan, Perdagangan |
| 1. **Indeks Resiko Bencana** | **Indeks** | **108,03** | **108,03** | **KKUPM** |
| 1. Persentase berkurangnya korban bencana alam | % | 0,06 | 0,06 | KKUPM |
| 1. **Indek Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks** | **57,33** | **57,33** | **Lingkungan Hidup** |
| 1. Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 75,20 | 75,20 | Lingkungan Hidup |
| 1. Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 52,60 | 52,60 | Lingkungan Hidup |
| 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 32,39 | 32,39 | Lingkungan Hidup |
| 1. **Tingkat Pertumbuhan ekonomi** | **%** | **3,5-4,0** | **3,5-4,0** | **Statistik** |
| 1. **Tingkat inflasi** | **%** | **3,0+1** | **3,0+1** | **Statistik** |
| 1. **PDRB Perkapita (Rp.000)** | **Rp.000** | **28.556** | **28.556** | **Statistik** |
| 1. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam | % | 15,01 | 15,01 | Pertanian |
| 1. Skor Pola Pangan harapan | Score | 82,00 | 82,00 | Pangan |
| 1. Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | % | 5,10 | 5,10 | Pariwisata |
| 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | % | 1,65 | 1,65 | Perdagangan |
| 1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 2,60 | 2,60 | Perindustrian |
| 1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor | % | 0,25 | 0,25 | Penanaman Modal, Kperasi UMKM |
| 1. **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **%** | **5,90** | **5,90** | **Tenaga Kerja** |
| 1. TPAK | % | 74,03 | 74,03 | Tenaga Kerja |
| 1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Indeks** | **75,96** | **75,96** | **Perencanaan** |
| 1. Harapan lama Sekolah | Tahun | 13,81 | 13,81 | Pendidikan |
| 1. Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,66 | 8,66 | Pendidikan |
| 1. Usia harapan Hidup | Tahun | 77,60 | 77,60 | Kesehatan |
| 1. **Indeks Desa Membangun (IDM)** | **Indeks** | **0,6845** | **0,6845** | **Permasdes** |
| 1. Indeks Ketahanan Sosial | Indeks | 0,7899 | 0,7899 | Permasdes |
| 1. Indeks Ketahanan Ekonomi | Indeks | 0,6319 | 0,6319 | Permasdes |
| 1. Indeks Ketahanan Lingkungan | Indeks | 0,6317 | 0,6317 | Permasdes |
| 1. **Nilai Kabupaten Peduli HAM** | **Nilai** | **80,50** | **80,50** | **Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)** |
| 1. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan | Kasus | 130 | 130 | KKUPM |
| 1. Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda | % | 88 | 88 | KKUPM |
| 1. Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus) | % | 0 | 0 | KKUPM |
| 1. **Indeks Pembangunan Kebudayaan** | **Indeks** | **79** | **79** | **Kebudayaan** |
| 1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 88,50 | 88,50 | Kebudayaan |
| 1. Persentase kelompok seni budaya yang aktif | % | 13,45 | 13,45 | Kebudayaan |
| 1. **Prestasi Pemuda dan Olahraga** | **Buah** | **4** | **4** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 1. Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional | Buah | 2 | 2 | Pemuda dan Olahraga |
| 1. Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Buah | 2 | 2 | Pemuda dan Olahraga |
| 1. **Angka Kemiskinan** | **%** | **9,86** | **9,86** | **Statistik** |
| 1. Pengeluaran Perkapita | (Rp.juta) | 13,35 | 13,35 | *Statistik* |
| 1. Persentase Penanganan PMKS | % | 2,00 | 2,00 | Sosial |
| 1. **IPG (Indeks Pembangungan Gender)** | **Indeks** | **97,25** | **97,25** | **PP dan PA** |
| 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 74,71 | 74,71 | PP dan PA |
| 1. Kabupaten Layak Anak | Score | 762 | 762 | PP dan PA |
| 1. **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **70** | **70** | **Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan)** |
| 1. Indeks SPBE | Indeks | 3,25 | 3,25 | Kominfo |
| 1. Nilai SAKIP | Nilai | 75 | 75 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
| 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | Keuangan |
| 1. Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN | Indeks | 60,00 | 60,00 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| 1. IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD) | % | 80,43 | 80,43 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
| 1. Maturitas SPIP | Level | 3 | 3 | Pengawasan |
| 1. Indeks Arsip | Indeks | 80 | 80 | Kearsipan |

*Sumber : Baperlitbang, 2021*